



LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 17 (tujuh belas)
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (PPU) Kemkumham, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP dan Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolkumham

Hari, Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*)

Hadir : 1. orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Dirjen HPI Kemlu, Ferry Adamhar, S.H., LL.M.
b. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ir. Reza Shah Pahlevi, M.Sc., Ph.D.
c. Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolkumham, Laksda TNI Dr. H. Sipahutar, M.Sc.
beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2 RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, dan Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolkumham pada

hari Selasa, tanggal 18 April 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. CATATAN:

Komisi I DPR RI telah mendengarkan masukan dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP dan Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*). Dari masukan tersebut, dapat dicatat bahwa manfaat dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 antara lain:

1. Garis batas ZEE yang jelas
2. Kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat Republik Indonesia
3. Mendukung hak nelayan Indonesia
4. Mencegah, mengurangi, dan menghalangi tindak kejahatan *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*
5. Menjamin pembangunan perekonomian di wilayah Laut Sulawesi

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 18 April 2017
KETUA RAPAT,

TTD

Dr. TB HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165

